

STRATEGI PARTAI PDIP DALAM MEMENANGKAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PADA PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Oleh :

Mohamad Ricky Pratama Syamsu,¹ Agustinus B. Pati², Trilke Erita Tulung³

ABSTRAK

Pemilu merupakan langkah awal partai politik dalam bersaing untuk merebutkan kekuasaan untuk menduduki kursi eksekutif dan/atau legislatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi yang digunakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk memenangkan calon yang diusungnya pada pemilu legislative tahun 2019 di Bolaang Mongondow Timur (Boltim). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa strategi yang digunakan Partai PDIP dalam kemenangan pemilu legislatif 2019 di Boltim. Strategi dimaksud antara lain menggunakan jaringan partai tingkat lokal, sosialisasi, melakukan berbagai event, kampanye, pencitraan figur, citra partai, bahkan melakukan *money politic*. Strategi yang dimainkan PDIP cukup berhasil dibuktikan dengan perolehan suara partai PDIP di daerah pemilihan 1 yang meliputi Kecamatan Modayag bersatu berhasil memperoleh suara 3,419 suara. Di samping itu ada perolehan suara partai lain yaitu PKB 1,301, GERINDRA 1,734, GOLKAR 3,081, NASDEM 3,978, GARUDA 15, BERKARYA 354, PKS 631, PERINDO 1,327, PPP 563, PSI 112, PAN 6.065, HANURA 758, DEMOKRAT 3,553, PBB 6, PKPI 178. Sedangkan perolehan suara di daerah pemilihan 2 yang meliputi Kecamatan Kotabunan, Tutuyan dan Nuangan. Partai PDIP memperoleh 3,195 suara. Dengan perolehan suara partai lain yaitu PKB 376, GERINDRA 347, GOLKAR 291, NASDEM 2,814, GARUDA 22, BERKARYA 76, PKS 1,319, PERINDO 926, PPP 17, PSI 103, PAN 4,798, HANURA 786, DEMOKRAT 1,746, PBB 968, PKPI 4. Dengan strategi yang di terapkan tersebut partai PDIP berhasil mendapatkan suara terbanyak ke enam di dapil 1 (daerah pemilihan 1) dan partai PDIP juga mendapatkan suara terbanyak ke dua di dapil 2 (daerah pemilihan 2

Kata Kunci : Strategi; Calon Legislatif; PDIP

ABSTRACT

Election is the first step for political parties in competing for power to occupy the executive and / or legislative seats. The purpose of this research is to find out and describe the strategies used by the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) to win the candidates it carries in the 2019 legislative elections in East Bolaang Mongondow (Boltim). This study used a qualitative method. Based on the results of the study, it was found that several strategies were used by the PDIP Party in winning the 2019 legislative elections in Boltim. The strategies referred to include using local level party networks, socialization, conducting various events, campaigns, image image, party image, and even conducting money politics. The strategy played by the PDIP was quite successful as evidenced by the vote acquisition of the PDIP party in electoral district 1 which includes the united Modayag District, which succeeded in getting 3,419 votes. In addition, there were other party votes, namely PKB 1.301, GERINDRA 1,734, GOLKAR 3.081, NASDEM 3,978, GARUDA 15, BERKARYA 354, PKS 631, PERINDO 1,327, PPP 563, PSI 112, PAN 6,065, HANURA 758, DEMOKRAT 3,553, PBB 6 , PKPI 178. Meanwhile, the vote acquisition was in the 2 electoral districts covering Kotabunan, Tutuyan and Nuangan Districts. The PDIP party received 3,195 votes. With the votes acquired by other parties, namely PKB 376, GERINDRA 347, GOLKAR 291, NASDEM 2,814, GARUDA 22, BERKARYA 76, PKS 1,319, PERINDO 926, PPP 17, PSI 103, PAN 4,798, HANURA 786, DEMOCRAT

¹ Mahasiswa program studi ilmu politik FISIP UNSRAT

² Staf pengajar FISIP UNSRAT selaku pembimbing 1

³ Staf pengajar FISIP UNSRAT selaku pembimbing 2

1,746, PBB 968, PKPI 4 With the strategy implemented, the PDIP party managed to get the sixth most votes in electoral district 1 (electoral district 1) and the PDIP party also received the second most votes in electoral district 2 (electoral district 2).

Keywords: Strategy; Legislative candidates; PDIP

PENDAHULUAN

Banyak partai yang sudah merencanakan atau menyusun strategi untuk memenangkan pemilu. Secara keseluruhan, partai politik membutuhkan suatu perencanaan strategi dalam melakukan hubungan dengan masyarakat. Perencanaan ini menyangkut produk politik yang akan dibawakan, *image* yang akan dimunculkan, program kampanye yang akan dilakukan dan strategi penggalangan massanya. Perencanaan perlu dilakukan agar alokasi sumberdaya (misalnya manusia, keuangan, dan infrastruktur) dapat dilakukan secara efisien. Selain itu, perencanaan itu dibutuhkan agar setiap program dan aktivitas partai memiliki kesamaan gerak dan arah.

Dan ini menyangkut dengan demokrasi, demokrasi merupakan sebuah pembebasan, pembebasan atas kekuasaan absolut monopoli dari satu ataupun segelintir (elit) manusia yang dimaksudnya. Secara harfiah demokrasi terangkai atas dua kata, *demos* yang berarti rakyat dan *kratos*/*kratein* yang bermakna kekuasaan/berkuasa. Sehingga secara sederhana dapat diartikan sebagai kekuasaan (dari, untuk dan oleh) rakyat atau *rule by the people* (Budiardjo, 1985: 50).

Pemilu dapat dikatakan sebagai langkah awal untuk mewujudkan perbaikan demokrasi di Indonesia dan dianggap sebagai tahap penyampaian kemajuan dalam perkembangan demokrasi negara ini.

Pemilu merupakan perwujudan dari demokrasi yang sesungguhnya karena kedaulatan sepenuhnya kembali kepada rakyat yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat serta akhirnya rakyat bebas menentukan pilihannya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia.

- a. bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan derwakilan daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien.
- c. bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- d. bahwa Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu di satukan dan di sederhankan menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak.

Carl J. Friedrich berpendapat bahwa partai politik adalah "sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan, berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idil maupun materil" (dalam Budiardjo, 2006: 161).

Perencanaan perlu dilakukan agar alokasi sumberdaya (misalnya manusia, keuangan, dan infrastruktur) dapat dilakukan secara efisien, selain itu perencanaan itu dibutuhkan agar setiap program dan aktivitas partai memiliki kesamaan gerak dan arah. Strategi sangat perlu dilakukan oleh setiap kontestan atau partai politik yang ikut dalam pemilu karena persaingan

juga secara intens melakukan upaya-upaya untuk memenangkan persaingan politik, dalam dunia politik persaingan sangatlah kuat untuk mendapatkan suara atau dukungan dari rakyat. Semua itu harus di pikirkan atau direncanakan oleh setiap partai politik kalau masih ingin bertahan di dunia politik yang bisa mendapat kekuasaan di pemerintahan (Firmansah, 2007: 121).

Strategi berawal dari suatu perencanaan yang tidak dapat terjadi dengan sendirinya, hampir semua elemen partai politik perlu dilibatkan dalam penyusunan perencanaan strategi partai politik yang bersangkutan, hal ini dapat dilakukan dengan identifikasi misi dan visi partai. Misi partai politik bisa menjelaskan mengapa partai politik itu berdiri dan ada visi partai politik bisa menjelaskan tujuan jangka panjang partai yang ingin mereka capai. Untuk dapat menyusun perencanaan yang komprehensif, partai tersebut harus memiliki perencanaan yang struktur dan jelas tentang apa yang akan dilakukan kemudian hari yaitu menjadi partai pemenang dalam pemilu. Salah satu partai yang menjadi objek penelitian penulis yaitu Partai PDIP sebagai partai yang memenangkan pemilu legislatif 2019 dalam skala nasional maupun di tingkat lokal di Bolaang Mongondow Timur.

LANDASAN TEORI

Partai politik merupakan suatu kelompok yang teroganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka (Budiarjo, 1999: 166).

Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” Partai politik sebagai organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintah dan bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat. Definisi tentang partai politik antara lain disampaikan oleh Carl J. Fredrich mengartikan partai politik sebagai “sekelompok manusia yang teroganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idil maupun materil” (Budiarjo, 1999: 161).

Selanjutnya Sigmund Neuman dalam karangannya *modern political parties* mengemukakan definisi sebagai berikut: “Partai politik adalah organisasi dari aktifis-aktifis politik yang berusaha untuk kekuasaan pemerintah serta merebut kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar pesaingan dengan satu golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda” (Budiarjo, 1999: 166) Kemudian berdasar definisi yang dikembangkan Neumann tersebut, Cheppy Hari Cahyono mengingatkan perlunya diperhatikan empat hal sehubungan dengan usaha memperjelas pengertian mengenai istilah partai politik. Keempat hal itu yaitu: (1) Partai politik merupakan suatu organisasi yang melakukan kegiatan-kegiatan politik dalam suatu masyarakat; (2) Partai politik mencurahkan perhatian untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya; (3) Partai politik berusaha mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok dan golongan masyarakat yang mempunyai pandangan berbeda-beda; dan (4) Partai politik merupakan lembaga perantara yang menghubungkan antara kekuatan-kekuatan sosial dan ideologi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan pejabat-pejabat pemerintah maupun lembaga-lembaga kenegaraan (Cahyono, 1991 : 195-196).

Partai politik berusaha mempertemukan kepentingan-kepentingan masyarakat luas dengan lembaga-lembaga yang melakukan kebijakan-kebijakan politik. Partai politik merupakan tempat menyalurkan aspirasi rakyat, di mana rakyat dapat ikut di dalamnya dan berpengaruh kuat dalam pemilu. Banyaknya partai politik ini melambangkan sebuah negara yang demokratis, yang kemudian diharapkan menjadi penyalur aspirasi rakyat yang beragam, serta penyeimbang kekuatan politik yang ada. Begitu juga dengan banyaknya partai, di harapkan menjadi lembaga kontrol terhadap pemerintah serta sebagai sarana mengkritik rezim yang berkuasa. Adapun ada

yang pro dan kontra dengan suburnya politik yang akan mendaftarkan diri sebagai peserta partai politik (Haryanto, 1984: 11).

Dalam negara demokratis partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

a. Partai sebagai Sarana Komunikasi Politik

Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Selain itu partai politik disini juga berfungsi untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, dengan demikian terjadi arus informasi dan dialog dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, dimana partai politik memainkan peranan sebagai penghubung antara pemerintah dan yang diperintah, antara pemerintah dengan masyarakat.

b. Partai sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui bagaimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Sosialisasi politik mencakup proses melalui mana masyarakat menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi yang lain. Salah satu upaya untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum maka partai harus melakukan upaya untuk mendapatkan dukungan rakyat, di sinilah fungsi partai politik sebagai sarana sosialisasi politik, tepatnya agar mendapatkan dukungan dari masyarakat. Sisi lain dari fungsi partai politik adalah upaya menciptakan citra (*image*) bahwa partai politik memperjuangkan kepentingan umum.

c. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Sarana rekrutmen politik yakni proses melalui partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Rekrutmen partai politik akan menjamin kontinuitas dan kelestarian partai dan sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyeleksi calon pimpinan partai atau pimpinan bangsa.

METODE PENELITIAN

Dasar Penelitian Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode yang digunakan dalam penelitian untuk mempelajari mutu atau bobot suatu benda ataupun dari suatu keadaan sosial yang sulit diukur dengan angka. Dalam metode pendekatan kualitatif, dimana pendekatan kualitatif perhatiannya lebih banyak ditujukan pada pembentukan teori substantif berdasarkan teori konsep-konsep yang timbul dari data empiris.

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2002: 13) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian melakukan penelitian pada latar alamiah, maksudnya peneliti melihat kenyataan yang ada dilapangan. Data deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.

PEMBAHASAN

Cara, taktik, strategi kan hampir sama, tetapi kami selaku caleg hanya mengambil poin-poin dari pusat dan penerapannya disesuaikan dengan daerah masing-masing, melalui komunikasi yang baik dan didukung dengan citra partai, tokoh (*figur*), seperti itu. (Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 24 Agustus 2020) Jadi berdasarkan pernyataan Erwin S Hasan S.Si selaku wakil bendahara DPC PDIP strategi yang digunakan oleh Partai PDIP dalam pemilu legislatif 2019 yaitu lebih mengacu pada strategi komunikasi dan strategi pencitraan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Jaringan Kekuasaan Tingkat Lokal

Kekuasaan yang dimaksud adalah dimiliki para elite yang ada di Boltim yaitu dari elite di tingkat struktural birokrasi (Pemerintah Kota, Kecamatan, Kelurahan bahkan hingga pengurus RT-RW), elite pengusaha, hingga elite di dalam kelompok pendukung. Hal ini merujuk dari

pernyataan Haryudi selaku Ketua Ranting PDIP Bolaang Mongondow Timur di Kec. Modayag bahwa:

“kekuasaan Bapak Olly Dondokambey sebagai Gubernur Sulawesi Utara merupakan keuntungan dan itu digunakan Partai PDIP untuk menjaring massa, pendukung atau pemilih, Dari elite ditingkat struktural birokrasi (Pemerintah Kota, Kecamatan, Kelurahan bahkan hingga pengurus RT-RW), elite pengusaha, elite dilingkungan kepengurusan Anggota DPR hingga elite di dalam kelompok pendukung.”

(Berdasarkan hasil wawancara bersama informan pada tanggal 24 Agustus 2020)

Sosialisasi merupakan langkah awal untuk memperkenalkan partai dan caleg ke masyarakat, dengan sosialisasi memungkinkan masyarakat dapat lebih tahu dan mengerti tentang apa yang di sampaikan oleh caleg seperti figur dirinya, penguatan jati diri partai yang mengusungnya (karakter partai, visi dan misi Partai PDIP) yang tujuannya untuk mengenalkan diri, memperoleh dukungan dan partisipasi masyarakat dan menggaet orang tersebut sampai ketinggian memberikan dukungan dan pilihan dan sosialisasi yang disampaikan tergantung latar belakang masyarakatnya. Seperti pernyataan dari Medy Lensun, ST, yaitu:

“Pendekatan atau sosialisai yang dilakukan oleh caleg berbedabeda tergantung karakteristik daerah pemilihan masing-masing. Bila di daerah yang religius maka para caleg juga ikut, seperti sosialisasi di pengajian, bakti sosial. Tergantung potensi dan karekter masing-masing. Sedangkan untuk caleg dari pusat (DPR) mereka ikut kita, bareng-bareng dan sosialisai harus dibarengi dengan program-program”.

- Kegiatan yang Terselenggara (Event)

Event merupakan kegiatan yang diadakan untuk mengumpulkan pihak-pihak tertentu untuk saling bertukar pendapat atau menyampaikan gagasan. Event juga dilakukan oleh Partai PDIP untuk mendekati diri kepada masyarakat atau salah satu strategi yang digunakan dalam menghadapi pemilu legislatif 2019 khususnya di Boltim.

Event atau kegiatan bisa datang dari mana saja, salah satunya dari organisasi pemuda seperti pernyataan Medy Lensun, ST selaku Ketua DPC PDIP yaitu:

“organisasi pemuda lahir langsung dari Partai PDIP seperti Pemuda PDIP atau perempuan PDIP tetapi belum terstruktur sampai bawah, yang sudah berjalanya itu PAC, Ranting, Anak Ranting, yang membantu dalam menjaring kaderkader baru (perekrutan melalui KTAnisasi), yang bisa merangkul organisasi pemuda lain, seperti mengajak mendekati tim sepak bola yang ada dalam daerah pemilihan, dan ada yang merangkul remaja masjid dll”.

(Berdasarkan hasil wawancara bersama informan pada tanggal 24 Agustus 2020)

Kegiatan yang dilakukan organisasi pemuda seperti dalam hal olah raga sepak bola (tim sepak bola), remaja masjid dengan pengajian merupakan kegiatan-kegiatan yang mereka senang, dengan merangkul pemuda-pemudi melalui kegiatan tersebut merupakan pendekatan yang dilakukan caleg Partai PDIP beserta kadernya yang dilakukan di setiap dapil-dapil yang ada Di Bolaang Mongondow Timur. Kegiatan yang dilakukan Partai PDIP bertujuan untuk menarik, merangkul dan mendapatkan dukungan atau suara dari pemilih dari lingkungan anak muda yang nantinya menjadi peserta pemilu. Kegiatan lain yang dimanfaatkan caleg Partai PDIP yaitu kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat seperti menghadiri rapat RT-RW, bakti sosial (khitanan massal, pengobatan gratis) dijadikan sebagai event pendekatan yang dilakukan partai PDIP maupun caleg untuk saluran politik dalam melaksanakan sosialisasi politik di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk memperoleh dukungan dari semua elemen masyarakat dan tidak membedakan pemilih dari golongan pemuda maupun orang tua. Sebagaimana yang diungkapkan Erwin sebagai Sekertaris DPC Partai PDIP mengatakan: “Partai PDIP tidak membedakan pemilih. Semua elemen masyarakat menjadi target dan garapan partai ini. Tak hanya masyarakat menengah saja. Tetapi Partai PDIP juga sangat pro terhadap wong cilik dan Partai PDIP juga pro terhadap investasi. Jadi tidak ada spesifikasi khusus terhadap para pemilih. Semuanya diakomodir di Partai PDIP”.

- Kampanye

Kampanye sangat dibutuhkan untuk menjangkau massa, melalui model kampanye terbuka dan model kampanye tertutup. Kampanye terbuka dilakukan dengan melakukan *long march*, berorasi dihadapan para simpatisan dan pendukung partai sedangkan kampanye tertutup dilakukan dengan mendatangi langsung tokoh warga masyarakat". Tidak cukup hanya dengan pernyataan tersebut, kemudian kembali ditegaskan melalui pernyataan berikut:

"saya selalu menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan masyarakat seperti rapat RT-RW dan kegiatan lainnya, bisa bertemu dengan masyarakat secara langsung, saling beramah tamah, door to door dengan kegiatan tersebut secara tidak langsung saya dapat dikenal di masyarakat dan masyarakat juga akan mengenal kita".

Dalam berkampanye baliho, sepanduk, bendera partai, itu sangat dibutuhkan sekali oleh partai maupun caleg, dengan atribut kampanye seperti itu akan membantu masyarakat, kalau tidak mengenal caleg kan bisa mengenal partainya, kalau sudah mengenal caleg akan lebih baik, walaupun dari mana partai yang mengungungnya, atribut tersebut sangat membantu sekali".

- *Money Politic* (Politik uang)

Sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap kali diselenggarakan pemilu legislatif maupun presiden dan wakil presiden maka *money politic* menjadi "corak hitam" yang selalu pekat mewarnai. Tak jarang hingga masyarakat akhirnya menganggap hal ini sebagai perilaku yang lumrah (biasa). Hal ini tidak saja terjadi di Bolaang Mongondow Timur saja melainkan merata di hampir seluruh wilayah Indonesia. Secara khusus Partai PDIP dalam melakukan pemberian bantuan bertujuan untuk menjangkau dukungan pemilih. Kegiatan tersebut dilakukan secara langsung dan tidak langsung melalui kampanye terbuka dan kampanye tertutup. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Erwin selaku sekretaris DPC Partai PDIP:

"sudah menjadi rahasia umum transaksi merupakan hal yang wajar dalam kancah perpolitikan, Partai PDIP bukan satusnya partai yang melakukan hal ini, tetapi hampir semua partai, dalam Partai PDIP tidak secara langsung memberi, tetapi dilakukan dalam bentuk bantuan dan diiringi dengan program, tanpa program tidak akan berhasil seperti fogging secara gratis, sunatan massal dan lain-lain".

(Berdasarkan hasil wawancara bersama informan pada tanggal 24 Agustus 2020)

Ditambah lagi pernyataan oleh Medy Lensun, ST. selaku Ketua DPC PDIP Bolaang Mongondow Timur dari Partai PDIP mengenai pemberian bantuan yaitu:

"transaksi yang saya lakukan itu tidak berupa uang yang langsung diberikan kemasyarakat, tetapi melalui suatu kegiatan yang ada di masyarakat, dalam kegiatan tersebut pasti membutuhkan snek, makan minum dan alain-lain, pemberian itu yang dikeluarkan partai maupun caleg tidak berupa uang tunai. Kalau pemberian uang juga ada tetapi untuk kader yang mengurus kegiatan tersebut. dan maksud dari politik transaksional berbeda dengan money politik, kalau politik transaksional kami hanya memberikan bantuan atau barang pada waktu ada kegiatan/event, tetapi kalau money politikkan langsung membeli suara contohnya caleg butuh 100 suara, e.perkepala Rp100.000 ya, politik itu yang saya hindari".

(Berdasarkan hasil wawancara bersama informan pada tanggal 24 Agustus 2020)

Kegiatan pemberian tersebut merupakan langkah yang efektif untuk mendapatkan simpatik dari masyarakat khususnya untuk daerah yang mendapatkan bantuan akan menganggap caleg Partai PDIP sebagai pemimpin yang memperhatikan rakyatnya. Selain itu terkait dengan pemberian bantuan yang dilakukan Partai PDIP diperjelas lagi oleh Medy Lensun mengatakan:

"kalau tentang bantuan pembangunan jalan berupa aspal maupun paving memang ada, tetapi yang meminta masyarakat sendiri, saya tidak bisa membantu dalam memberikan uang, tetapi hanya membantu mengurus proposal tersebut dan meminta bantuan anggota dewan yang sudah jadi, itukan wajar hanya membantu prosesnya"

Secara empiris eksistensi sebuah partai politik, menurut Ali Syafa'at, dapat dilihat berdasarkan tiga aspek. Diantaranya adalah aspek sosiologis, aspek yuridis dan juga aspek

politis (Syafa'at, 2008: 65). Aspek sosiologis menurutnya nampak dari adanya gerakan-gerakan sosial yang diperjuangkan sebuah partai politik sejak didirikan. Sedangkan dalam aspek yuridis, menyitir Hans Kelsen, Syafa'at menjelaskan bahwa eksistensi partai politik secara hukum ada ketika menerima status secara sah sebagai badan hukum baik karena cara pembuatan maupun setelah proses tertentu. Kemudian dalam aspek politis eksistensi sebuah partai politik ada ketika partai politik tersebut terlibat dalam aktivitas politik, terutama dalam kaitannya dengan proses penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam negara demokrasi mekanisme utama untuk memasuki wilayah dan kekuasaan politik adalah dengan hanya melalui "gerbang" pemilihan umum, oleh karenanya keberadaan dan kekuatan partai politik secara politis ditentukan saat mengikuti pemilihan umum di negara yang bersangkutan.

Hasil perolehan suara pada pemilu legislatif 2019 di Bolaang Mongondow Timur. PDIP 3,419 suara, PKB 1,301, GERINDRA 1,734, GOLKAR 3,081, NASDEM 3,978, GARUDA 15, BERKARYA 354, PKS 631, PERINDO 1,327, PPP 563, PSI 112, PAN 6.065, HANURA 758, DEMOKRAT 3,553, PBB 6, PKPI 178 suara. Perolehan suara di daerah pemilihan 2 yang meliputi Kecamatan Kotabunan, Tutuyan dan Nuangan. PDIP 3,195 suara, PKB 376, GERINDRA 347, GOLKAR 291, NASDEM 2,814, GARUDA 22, BERKARYA 76, PKS 1,319, PERINDO 926, PPP 17, PSI 103, PAN 4,798, HANURA 786, DEMOKRAT 1,746, PBB 968, PKPI 4 suara.

Disini partai PDIP tidak menjadi suara terbanyak pertama tetapi partai PDIP bisa meraih cukup banyak kursi di DPR dan bisa mewakili rakyat Bolaang Mongondow Timur. Oleh sebab itu strategi yang digunakan dan di terapkan di lapangan bisa di bilang partai PDIP dan semua tim sukses yang bekerja di lapangan berhasil mewujudkan impian tersebut dan Caleg Partai PDIP harus lebih berani untuk memberikan kesempatan dan membuka ruang kepada masyarakat di wilayah tertentu yang terdapat basis partai lain, dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat tersebut.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tentang strategi Partai PDIP dalam pemenangan pemilu legislatif 2019 di Bolaang Mongondow Timur, memfokuskan tentang strategi yang di gunakan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

Strategi Partai PDIP dalam pemenangan pemilu legislatif 2019 di Bolaang Mongondow Timur meliputi: strategi yang di gunakan dalam memenangkan partai PDIP; (1) jaringan kekuasaan tingkat lokal yaitu menghimpun kekuasaan mayoritas elite lokal di Bolaang Mongondow Timur untuk kemudian mengikatnya (baik secara sukarela ataupun melalui tekanan struktural), dengan memanfaatkan pengaruh elite secara luas, baik di struktural birokrasi, pengusaha maupun elite di lingkungan pendukung (2) Sosialisasi dengan melakukan pencitraan (figur caleg) dan penguatan jati diri (*karakter partai*) terhadap masyarakat serta menyampaikan visi dan misi serta program Partai PDIP; (3) menghadiri atau mengadakan *event* dilingkungan masyarakat dengan menyampaikan program, kampanye atau sosialisai ke masyarakat (4) melakukan kampanye tertutup atau kampanye langsung dan kampanye terbuka atau kampanye tidak langsung; (5) *money politic* dilakukan melalui kampanye terbuka atau tertutup. Strategi *kedua* yaitu pencitraan meliputi; (6) figur pemimpin yakni Joko Widodo sebagai presiden, kepiawaiannya membangun citra (sebagai pemimpin yang santun, jujur serta pemurah (*benevolent*), yang menghegemoni masyarakat; (7) citra Partai PDIP dikenal sebagai partai yang besar, kuat, baik, membela rakyat, dan memiliki komitmen terhadap nasib rakyat kecil, terhadap persoalan yang di hadapi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Anwar. 2004. *Pencitraan Dalam Politik*. Surabaya: SIC
- Arifin, A. 2011. *Komunikasi Politik: Filsafat, Paradigma, Teori, Tujuan, Strategi, dan Komunikasi Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, S. 2006 *Prosedur penelitian: suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Firmanzah. 2007. *Marketing Politik (antara pemahaman dan relistis)*. Jakarta: Yayasan Obor

Indonesia.

- Firmanzah. 2008. *Mengelola partai politik (Komunikai dan positioning ideology Politik di Era Demokasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gramsci dalam Roger Simon. *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*. Pustaka Pelajar.
- Haricahyono, Cheppy. 1991. *Ilmu Politik Dan Perspektifnya*. Yogyakarta: Tri Wacana Yogya.
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi), 2004
- Meleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pito, TA. 2006. *Mengenal Teori-Teori Politik*. Bandung: Penerbit Nuansa
- Rahman, Arifin. 2001. *Sistm Politik Indonesia*. Surabaya: SIC
- Sastroadmodjo, Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Sarwono, S. W., Meinarno, E. A. 2009. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

Sumber-Sumber Lain :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum